

BAB II

PROGRAM MAMPU SEBAGAI BENTUK KERJASAMA KEMITRAAN AUSTRALIA DENGAN INDONESIA

Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci tentang program MAMPU yang dijalankan sebagai program kemitraan dari bantuan kerjasama Australia di Indonesia. Program MAMPU yang dijelaskan peneliti dalam hal ini akan digunakan sebagai penjas untuk bab-bab selanjutnya dalam mendeskripsikan konsep yang peneliti angkat kedalam topik yang ada. Bab ini akan menjelaskan secara ringkas gambaran umum program MAMPU serta aktor-aktor mitra yang terlibat dalam program MAMPU sebagai dukungan yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan Indonesia terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan Indonesia yang ditunjukkan oleh pemerintah Australia dan Indonesia dengan cara bermitra dengan organisasi yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kemitraan dalam pembahasan ini lebih menjelaskan peran serta tugas mitra yang terlibat dalam kerjasama program MAMPU.

2.1 Inisiatif Pemberdayaan Perempuan Melalui Program MAMPU

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang harus diperhatikan. Indonesia sebagai negara berkembang dan mempunyai jumlah penduduk yang banyak tidak dapat terhindar dari permasalahan tersebut. Permasalahan kemiskinan sering dialami oleh perempuan. Perempuan Indonesia masih menjadi golongan yang rentan terhadap kemiskinan sehingga dalam hal ini perempuan Indonesia harus mendapat perhatian dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi Perempuan yaitu masih tertinggal dalam hal partisipasi angkatan kerja, partisipasi politik, dan

pencapaian pendidikan dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, kemajuan dalam kesetaraan dan pemberdayaan perempuan merupakan bagian penting dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang memiliki sifat inklusif.²⁹

Menindaklanjuti permasalahan tersebut pada tahun 2012 pemerintah Indonesia yang diwakili oleh BAPPENAS dan Australia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) berinisiatif untuk membangun hubungan kerjasama yang berbasis gender untuk menanggulangi kemiskinan yang berfokus pada perempuan Indonesia yaitu melalui program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan). Indonesia dan Australia telah mengadakan program Australia Indonesia Partnership (AIP) . Program MAMPU merupakan salah satu bentuk kerjasama Australia dan Indonesia untuk pengentasan kemiskinan yang berbasis gender. MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin kelayakan dasar untuk kehidupan yang lebih baik dengan cara memperkuat organisasi-organisasi perempuan dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap isu gender untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar mendukung perempuan miskin.

Program MAMPU memiliki 2 fase didalamnya, fase pertama program MAMPU dilaksanakan pada tahun 2012-2016 bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin kepada layanan publik dan penghidupan yang lebih baik. Fokus fase pertama yaitu terhadap kebijakan, peraturan dan layanan pemerintah yang lebih baik yang dicapai melalui kemitraan antara koalisi organisasi

²⁹*Info Kit Final MAMPU dalam Bahasa Indonesia* dari diakses dari www.mampu.or.id (27/02/2019, 21.49 WIB)

masyarakat sipil, pemerintah Indonesia dan organisasi yang bekerja pada isu gender. Fase kedua program MAMPU dilaksanakan pada tahun 2017-2020 bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin kepada layanan penting dan program-program pemerintah lainnya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan mendukung pemerintah Indonesia dalam pencapaian tujuan-tujuan SDGs yang relevan. Fokus fase kedua yaitu terhadap kebijakan, peraturan dan layanan pemerintah yang lebih baik. Menguatkan dan menyempurnakan kebijakan, peraturan dan layanan dengan skala yang lebih luas dan dampak yang lebih besar.³⁰

Program MAMPU memiliki sasaran untuk membangun jaringan dan koalisi inklusif yang dipimpin oleh organisasi perempuan, organisasi yang tertarik pada isu gender serta pada anggota parlemen yang telah dikuatkan dalam rangka untuk mempengaruhi kebijakan, peraturan, dan layanan pemerintah, serta dalam beberapa bidang tertentu pada sektor swasta, agar dapat meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan-layanan penting.³¹ Ada lima bidang tematik strategis program MAMPU yaitu, *pertama*, peningkatan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial. *Kedua*, peningkatan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja. *Ketiga*, perbaikan kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri. *Keempat*, peningkatan kesehatan gizi dan perempuan. *Kelima*, pengurangan kekerasan terhadap perempuan.

Pelaksanaan program MAMPU dengan jangkauannya yang luas berpedoman pada Kerangka Pemberdayaan MAMPU dengan mendefinisikan

³⁰Update dari program MAMPU diakses dari <http://www.mampu.or.id/id/video/update-dari-program-mampu> (23/07/2018. 09.22 WIB)

³¹*Ibid.*

pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses di mana kehidupan perempuan dapat diubah dengan situasi yang memiliki kekuatan dan akses yang terbatas menjadi situasi di mana kekuatan dan agensi mereka lebih meningkat dari sebelumnya. Melalui proses pemberdayaan, perempuan dapat memperoleh kombinasi lima aset yang terdapat pada tingkatan individu, pemberdayaan mencakup perubahan dalam kemampuan, pengetahuan dan harga diri. Keterlibatan kelompok-kelompok perempuan setempat, MAMPU juga membuka akses perempuan miskin ke berbagai macam aset seperti manusia, sosial, pendukung, kapasitas, keuangan dan juga sumber daya.³²

MAMPU menyediakan hibah dan dampingan dalam bentuk asistensi teknis kepada 14 mitra utama terpilih. Mitra utama tersebut bekerjasama dengan jaringan yang ada terdiri dari 100 organisasi lokal yang melaksanakan kegiatan MAMPU di 944 desa di 154 Kabupaten/kota di 27 provinsi di Indonesia. Mitra-mitra yang turut serta dalam program MAMPU memberdayakan perempuan dengan cara sebagai berikut yaitu membentuk kelompok perempuan lokal dan mengorganisasikan masyarakat, membentuk komite untuk memantau layanan terpilih, bekerjasama dengan tokoh agama dan masyarakat, menyediakan program pendidikan dan literasi bagi masyarakat dewasa, melakukan advokasi kepada pemerintah daerah atau parlemen daerah melalui forum multi-pemangku kepentingan, adanya kampanye publik dan keterlibatan media, membimbing dan melatih pemimpin-pemimpin perempuan, mengumpulkan dan menyediakan data tentang penerimaan manfaat kepada pemerintah daerah setempat, berpartisipasi aktif dalam aksi kolektif antara Mitra MAMPU, OMS dan jaringan mereka.³³

³²Info kit Program MAMPU.

³³*Ibid.* Info kit Program MAMPU.

MAMPU berpedoman pada gagasan bahwa kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan tujuan dan sarana untuk pencapaian lima area tematik. Dengan menempatkan perempuan di pusat pembangunan dan upayanya, akses yang lebih besar terhadap layanan akan terwujud ketika perempuan telah diberdayakan sehingga dapat menyuarakan pilihan dan pengaruh mereka. MAMPU mengidentifikasi dan mendukung kegiatan di seluruh program yang membangun momentum penting untuk perubahan yang bersifat transformatif dengan tujuan utama kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.

MAMPU berharap program yang dijalankan dapat membangun koalisi dan jaringan dengan gerakan perempuan yang lebih luas, dalam badan regional ataupun global dalam menanggapi isu-isu kontekstual yang menjadi kunci yang relevan untuk percepatan kemajuan area tematik. Selain itu, MAMPU juga mengharapkan adanya sinergi dan memperkuat kapasitas mitra dan sub-mitra MAMPU untuk tujuan pemberdayaan perempuan di masyarakat sehingga dapat memaksimalkan kerja mitra pada isu-isu yang ditangani satu area tematik. Hal ini sesuai dengan konsep kemitraan dimana menekankan pada kerjasama MAMPU sebagai lembaga di bawah Pemerintahan Australia di Indonesia yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui mitra. Dengan adanya mitra-mitra yang jelas visi dan tujuannya, memudahkan MAMPU untuk mengimplementasikan program di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Pemerintah dan pelaksana MAMPU harus bekerjasama dengan mitra yang sesuai dengan tiga prinsip kemitraan yaitu kesetaraan, transparan dan saling menguntungkan.

Perempuan kemudian diharapkan dapat turut aktif di masyarakat dalam pengambilan keputusan dan membawa perubahan yang progresif. MAMPU juga memiliki isu *cross-cutting* yang secara tidak langsung keluar dari area tematik utama namun masih memiliki kesinambungan yang cukup kuat pada masalah perempuan. Isu tersebut seperti isu perkawinan anak, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), disabilitas, perempuan yang bekerja di parlemen, keberlanjutan mitra dan pemberdayaan masyarakat serta koalisi dan jaringan mitra MAMPU yang berpusat pada perempuan.

Program MAMPU dalam model kesesuaian implementasi telah sesuai dengan konsep yang telah digambarkan oleh korten yang mencakup terhadap tiga elemen dalam melaksanakan program yaitu kesesuaian program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan yang terakhir kesesuaian antara syarat yang telah dicetuskan organisasi untuk memperoleh *output* yang dihasilkan dan organisasi yang terlibat dalam area tematik seperti, peningkatan akses perempuan terhadap program perlindungan pemerintah, peningkatan akses perempuan pada pekerjaan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja, perbaikan kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan di luar negeri, peningkatan kesehatan gizi dan perempuan, dan pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan. Sehingga dalam konteks kemitraan program MAMPU pada struktur pengorganisasian, struktur organisasi yang dijalankan jelas dimana MAMPU dan mitra sebagai tenaga pelaksana memiliki kompetensi yang berkualitas sesuai dengan peran atau fungsi yang telah dibutuhkan dalam menangani permasalahan terkait dengan pemberdayaan perempuan melalui lima

area tematik strategis MAMPU dapat dilihat dalam Tabel 2.1 Ringkasan Analisa Konsep Kemitraan.

Tabel 2.1 Ringkasan Analisa Konsep Kemitraan

NO	Organisasi dan Mitra MAMPU	Area Tematik Strategis MAMPU	Prinsip Kemitraan
1.	AUSAID (<i>Australia Agency For International Development</i>)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan dan Keseimbangan - Transparan - Saling Menguntungkan
2.	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)	-	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan dan Keseimbangan - Transparan - Saling Menguntungkan
3.	PEKKA, KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia	Peningkatan Akses Perempuan Terhadap Program Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan dan Keseimbangan - Transparan - Saling Menguntungkan
4.	Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia, TURC (<i>Trade Union Rights Centre</i>), Bitra Indonesia, Yayasan Annisa Swasti	Peningkatan Akses Perempuan Pada Pekerjaan Serta Menghilangkan Diskriminasi di Tempat Kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan dan Keseimbangan - Transparan - Saling Menguntungkan
5.	Migrant Care	Perbaikan Kondisi Untuk Migrasi Tenaga Kerja Perempuan Ke Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan dan Keseimbangan - Transparan - Saling Menguntungkan

6.	Aisyiyah, Yayasan Kesehatan Perempuan, PERMAMPU	Peningkatan Kesehatan Gizi dan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan dan Keseimbangan - Transparan - Saling Menguntungkan
7.	Forum Pengada Layanan, KOMNAS Perempuan, BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia)	Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesetaraan dan Keseimbangan - Transparan - Saling Menguntungkan

Berdasarkan pada kemitraan, program kemitraan MAMPU dinaungi oleh Australia melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) dan Indonesia melalui BAPPENAS serta organisasi yang berfokus pada perempuan. Mengacu pada tiga prinsip kemitraan, para mitra MAMPU harus menerapkan prinsip kesetaraan atau keseimbangan agar memiliki hubungan yang baik dan saling percaya antara mitra yang lain, perlu adanya transparansi dalam mengelola dana maupun informasi serta saling menguntungkan satu sama lain antar mitra dan pihak yang terlibat. Dalam melaksanakan program terdapat aktor atau mitra yang terlibat dan memiliki fungsi masing-masing yang akan dijelaskan pada sub bab berikut ini.

2.2. Kemitraan/Aktor yang terlibat dalam Program MAMPU

Gambaran aktor-aktor dalam implementasi program MAMPU adalah mitra-mitra yang ditunjuk oleh MAMPU. Sebagai mitra, aktor-aktor ini melibatkan kelompok masyarakat dan pemerintah daerah seperti Kabupaten dan Kota dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di bawah lima area tematik MAMPU. Kemitraan kerjasama program MAMPU dilaksanakan oleh *state-state* yaitu antara Australia dengan Indonesia kemudian didukung oleh lembaga non pemerintah AUSAID sebagai donor yang memberikan bantuan berupa dana hibah terhadap program MAMPU dan

pengelolaan dana hibah tersebut dilakukan oleh organisasi pendukung program MAMPU melalui YAPPIKA dan dibagikan oleh mitra terpilih MAMPU.

Mitra-mitra tersebut memiliki tugas dan perannya masing-masing sehingga dapat memberikan pengaruh yang sangat penting dalam implementasi program MAMPU, sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.1 mengenai aktor mitra MAMPU.

Tabel 3.1 Aktor Mitra MAMPU

NO	Organisasi dan Mitra MAMPU	Area Tematik Strategis MAMPU	Peran Organisasi/Mitra MAMPU
1.	AUSAID (<i>Australia Agency For International Development</i>)	-	Sebagai lembaga pemberi dana hibah Program MAMPU
2.	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)	-	Sebagai mitra pengelola dana hibah dari AUSAID
3.	PEKKA, KAPAL Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia	Peningkatan Akses Perempuan Terhadap Program Perlindungan Sosial	Sebagai mitra pelaksana Program MAMPU yang berfokus terhadap program perlindungan sosial pemerintah
4.	Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia, TURC (<i>Trade Union Rights Centre</i>), Bitra Indonesia, Yayasan Annisa Swasti	Peningkatan Akses Perempuan Pada Pekerjaan Serta Menghilangkan Diskriminasi di	Sebagai mitra pelaksana Program MAMPU yang berfokus terhadap peningkatan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan

		Tempat Kerja	diskriminasi di tempat kerja
5.	Migrant Care	Perbaikan Kondisi Untuk Migrasi Tenaga Kerja Perempuan Ke Luar Negeri	Sebagai mitra pelaksana Program MAMPU yang berfokus terhadap perempuan pekerja luar negeri
6.	Aisyiyah, Yayasan Kesehatan Perempuan, PERMAMPU	Peningkatan Kesehatan Gizi dan Perempuan	Sebagai mitra pelaksana Program MAMPU yang berfokus terhadap peningkatan kesehatan gizi pada perempuan
7.	Forum Pengada Layanan, KOMNAS Perempuan, BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia)	Pengurangan Kekerasan Terhadap Perempuan	Sebagai mitra pelaksana Program MAMPU yang berfokus terhadap pengurangan tindak kekerasan terhadap perempuan

Pada tabel 3.1 menjelaskan tentang aktor dan mitra yang berperan terkait dengan pelaksanaan program MAMPU dan disesuaikan dengan lima area tematik program, area tematik program pertama yaitu mengenai peningkatan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial, mitra pelaksana area program ini dilakukan oleh PEKKA, KAPAL Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia, area tematik program kedua yaitu mengenai peningkatan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja, mitra pelaksana area program ini dilakukan oleh Mitra Wanita pekerja Rumah tangga Indonesia atau (MWPRI), TURC, BITRA Indonesia, dan Yayasan Annisa Swasti. Pada area program ketiga yaitu perbaikan kondisi untuk migrasi tenaga kerja

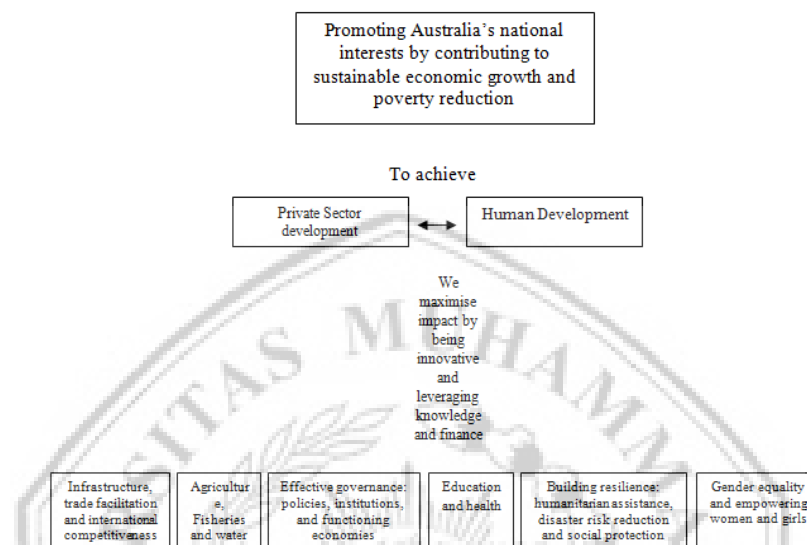
perempuan ke luar negeri, mitra pelaksana area program ini dilakukan oleh Migrant Care. Kemudian, pada area program keempat yaitu Peningkatan kesehatan gizi dan perempuan ibu, mitra pelaksana area program ini dilakukan oleh Aisyiyah, Yayasan Kesehatan Perempuan dan PERMAMPU. Selanjutnya pada area program kelima yaitu pengurangan kekerasan terhadap perempuan, mitra pelaksana area program ini dilakukan oleh Forum Pengada Layanan, Komnas Perempuan, BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mitra atau aktor yang terlibat dalam program MAMPU akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 AUSAID (*Australia Agency For International Development*)

Agensi AUSAID didirikan dibawah pemerintahan Whitlam Labor yang pada saat itu menjabat sebagai *Australian Development Assistant Agency* atau ADAA pada tahun 1974. Nama agensi tersebut sempat mengalami perubahan beberapa kali hingga akhirnya menjadi AUSAID di bawah pemerintahan Keating pada tahun 1995. AUSAID memiliki peran untuk memberi saran atas kebijakan dan implementasi bantuan luar negeri non-militer, berkontribusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan menjaga ekonomi dalam skala keberlanjutan. Dalam program MAMPU, peran AUSAID sebagai lembaga pendukung pemberian dana hibah. AUSAID bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan layanan pendidikan, kesehatan, memerangi korupsi, memperbaiki keamanan dan stabilitas politik. AUSAID aktif menjalin kerjasama dengan *United Nations, World Bank,*

Australian Red Cross dan World Vision agar dapat berkoordinasi saat memberikan bantuan³⁴.

Gambar 2.1 *The Strategic Framework for The Aid Program*



Sumber: Website Resmi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (online)
<https://dfat.gov.au/aid/Pages/australias-aid-program.aspx>

Bantuan dari AUSAID bertujuan untuk mempromosikan kepentingan nasional Australia dengan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor utama yang menjadi fokus AUSAID adalah memberikan dukungan kepada sektor privat dan penguatan sumber daya alam. *Strategic framework* yang terdapat pada Gambar 2.1 menjelaskan tentang investasi Australia pada enam sektor seperti memfasilitasi perdagangan dan infrastruktur agar dapat bersaing secara kompetitif dalam skala internasional. Sektor kedua adalah agrikultur perikanan dan pertanian serta fokus pada akses air bersih. Sektor ketiga adalah efektifitas pemerintahan seperti penguatan kebijakan

³⁴ Situs Resmi Departemen Luar Negeri Australia (online)
<https://dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/development-assistance-in-indonesia.aspx>

dan fungsi institusi dalam rangka meningkatkan perekonomian. Sektor keempat adalah fokus pada pengembangan pendidikan dan kesehatan warga di daerah tertinggal. Fokus kelima adalah membangun ketahanan kemanusiaan, asistensi dan penanggulangan korban bencana dan perlindungan sosial bagi warga penerima bantuan. Fokus terakhir adalah mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan³⁵.

MAMPU merupakan fokus keenam dari AUSAID yaitu mengenai *gender equality and empowering women and girls* atau kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ketidaksetaraan gender yang ada pada suatu negara merusak pertumbuhan ekonomi serta dapat mengganggu jalannya perdamaian dan keamanan. Pembangunan suatu Negara juga dapat terhambat karena pembangunan manusia yang terkendala kemiskinan. Secara global, AUSAID mencatat wanita masih mendapatkan diskriminasi dengan berpenghasilan di bawah rata-rata sekitar 10 hingga 30 persen dari penghasilan pria dengan pekerjaan yang sama. Perempuan sejatinya memiliki peningkatan penghasilan hingga 76% dalam partisipasi yang sama dengan laki-laki. Partisipasi perempuan juga semakin menurun dalam parlemen dan hanya 6 persen saja di Negara Kepulauan Pasifik dengan rata-rata global hingga 23,3 persen. Tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga banyak dialami oleh perempuan dan dalam tahap yang cukup mengkhawatirkan.³⁶

³⁵Situs resmi AUSAID, diakses dari <https://dfat.gov.au/aid/Pages/australias-aid-program.aspx> (27/02/2019, 21.49 WIB)

³⁶Situs Resmi AUSAID diakses dari <https://dfat.gov.au/aid/topics/investment-priorities/gender-equality-empowering-women-girls/Pages/gender-equality-empowering-women-girls.aspx> (27/02/2019, 21.47 WIB)

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan berkontribusi terhadap pertumbuhan, perkembangan, stabilitas serta keamanan. Perempuan berpendidikan memiliki kesadaran akan pendidikan dan kesehatan anak serta dapat mengurangi beban ketergantungan. Kesetaraan gender dan strategi pemberdayaan perempuan adalah bagian inti dari kebijakan luar negeri dan diplomasi ekonomi. Pemerintah harusnya dapat berkomitmen lebih untuk penguatan kemampuan perempuan secara global sehingga dapat memajukan reputasi global. Strategi AUSAID dalam fokus ini memiliki tiga prioritas utama yaitu meningkatkan suara perempuan dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan dan pembangunan perdamaian mempromosikan pemberdayaan ekonomi perempuan dan dapat mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.³⁷

Model pemberian bantuan AUSAID melalui empat panduan strategis dengan mentranslasikan framework yang telah ada dengan implementasi praktis. Keempat panduan tersebut bertujuan untuk memastikan tercapainya kepentingan nasional Australia dan memperluas pengaruh Australia di Negara-negara penerima bantuan yang notabene adalah Negara dunia ketiga. AUSAID juga memastikan dampak positif pemberian bantuan agar tepat sasaran dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Australia kemudian merefleksikan nilai-nilai tambah bagi kedua Negara dan membuat perhitungan kinerja yang positif melalui inovasi.³⁸ Pemerintah Australia sangat berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak di kawasan Indo-Pasifik. Komitmen tersebut kemudian

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid,

diwujudkan dengan membentuk program bantuan di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

2.2.2 Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)

YAPPIKA atau Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berdiri pada tahun 1991 yang bekerja bersama dengan sebagian masyarakat untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik seperti bidang pendidikan dan kesehatan. YAPPIKA juga bekerja dalam memastikan terjaganya kebebasan berkumpul serta berpendapat dalam mendukung peningkatan kapasitas untuk organisasi nirlaba lainnya. YAPPIKA bekerja dengan organisasi tingkat nasional maupun kabupaten dan pemerintah yang terkait sektor-sektor terkait untuk berkontribusi dalam menangani ketimpangan dan ketidakadilan terhadap sebagian masyarakat yang tertinggal.³⁹ Peran yang dilakukan YAPPIKA dalam mendukung pelaksanaan program MAMPU yaitu sebagai organisasi yang mengelola dana hibah pemberian dari AUSAID.

2.2.3 Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

Yayasan PEKKA dibentuk pada tahun 2002 di Pulau Adonara NTT. PEKKA mendeskripsikan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola urusan rumah tangga, menjadi penjaga dalam keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil sebuah keputusan di dalam keluarga. Perempuan yang termasuk dalam

³⁹Tentang YAPPIKA diakses dalam <https://yappika-actionaid.or.id/bagaimana-yappika-actionaid-menggalang-dana-publik/> (28/03/2019. 08.10 WIB)

deskripsi tersebut adalah perempuan yang bercerai, perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya, perempuan yang suaminya meninggal dunia, perempuan yang statusnya tidak menikah namun memiliki tanggungan terhadap keluarga, kemudian perempuan yang memiliki suami namun karena suatu hal suaminya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dan perempuan yang memiliki suami namun suaminya tidak hidup dengannya karena merantau ataupun berpoligami.⁴⁰

Yayasan PEKKA sangat didukung oleh MAMPU sebagai Mitra yang memiliki peran untuk bekerjasama dalam Peningkatan akses perempuan terhadap program-program perlindungan pemerintah di Indonesia. PEKKA memiliki pendekatan yang dikembangkan sebagai mitra MAMPU yaitu KLIK (Klinik Layanan Informasi dan Konsultasi) PEKKA merupakan model layanan keliling yang bertugas untuk menjangkau dan memasukan perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga kedalam sistem data nasional agar akses perempuan terhadap program perlindungan sosial meningkat. Kemudian membangun kapasitas kepemimpinan dan organisasi perempuan kepala keluarga dan membentuk kelompok simpan-pinjam serta mendukung membentuk kegiatan usaha kecil lewat inisiatif PEKKA MART.⁴¹

2.2.4 KAPAL Perempuan

Pada Tahun 2000 Institut KAPAL Perempuan didirikan dan memiliki tujuan untuk membangun gerakan perempuan dan gerakan sosial yang dapat mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta perdamaian di

⁴⁰Latar Belakang PEKKA diakses dari website resmi PEKKA <https://pekka.or.id/latar-belakang/> (01/03/2019. 16.24 WIB)

⁴¹Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/pekka-yayasan-pemberdayaan-perempuan-kepala-keluarga/> (01/03/2019. 16.49 WIB)

ranah publik maupun privat. Para aktifis mendirikan KAPAL Perempuan sebagai sebuah bentuk keprihatinan pada situasi konflik dan kekerasan yang diakibatkan oleh politik identitas yang berbasis suku dan agama yang terjadi di berbagai daerah Indonesia dan juga bentuk keprihatinan terhadap adanya permasalahan pelanggaran tentang hak-hak asasi perempuan termasuk seksualitas dan kesehatan reproduksi perempuan serta diskriminasi terhadap kelompok marginal dan minoritas.⁴²

Sejak tahun 2012 program MAMPU telah bermitra dengan Institut KAPAL Perempuan. Bersama dengan jejaring mitra lokal KAPAL Perempuan memiliki peran untuk berfokus dalam memberdayakan perempuan dan memperkuat akses perempuan terhadap program dan layanan pemerintah yang didukung oleh MAMPU. KAPAL Perempuan memiliki program organisasi sebagai mitra MAMPU⁴³ yaitu Sekolah Perempuan yang merupakan sebuah wadah pendidikan dan pelatihan informal berbasis komunitas guna memberdayakan perempuan miskin di akar rumput serta menciptakan kepemimpinan perempuan lokal yang dapat mengadvokasi hak-hak perempuan, kebijakan serta anggaran yang dapat mendukung perempuan dalam mengakses layanan.

2.2.5 Koalisi Perempuan Indonesia

Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI berdiri pada tahun 1998 mengadvokasi kelompok perempuan miskin dan marginal untuk kesetaraan gender dan keadilan di Indonesia. Koalisi perempuan Indonesia menolak segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kelas sosial, agama, kepercayaan, ras, etnis, orientasi

⁴²*Sejarah Institut KAPAL Perempuan* diakses dari <http://kapalperempuan.org/profil/sejarah/> (01/03/2019, 16.49 WIB)

⁴³*Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif (KAPAL) Perempuan* diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/institut-kapal-perempuan-lingkaran-pendidikan-alternatif-perempuan/> (01/03/2019, 17.20 WIB)

seksual, warna kulit, bentuk tubuh, kemampuan fisik yang berbeda, usia, status perkawinan, pekerjaan, dan pandangan politik.⁴⁴ Sebagai mitra MAMPU KPI memiliki program organisasi untuk peningkatan akses perempuan terhadap program perlindungan sosial dengan cara mendirikan Balai Perempuan, kelompok perempuan guna memperkuat pengorganisasian komunitas dan juga kepemimpinan perempuan, kelompok Balai Perempuan mengembangkan inisiatif berupa PIPA-JKN yaitu pusat informasi, pengaduan dan advokasi Jaminan Kesehatan Nasional.⁴⁵

2.2.6 Trade Union Rights Centre (TURC)

Trade Union Rights Centre (selanjutnya disingkat TURC) berdiri pada tahun 2004 dan mengemban peran sebagai Pusat Studi dan Advokasi Perburuhan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi untuk mendukung peran serikat pekerja dalam memperjuangkan hak buruh dan kesejahteraan untuk buruh dan keluarga. TURC berfokus pada pemberdayaan pekerja serta serikat pekerja melalui advokasi hukum perburuhan secara litigasi maupun non litigasi dengan memfasilitasi pelatihan dan lokakarya peningkatan kapasitas dari serikat pekerja dan turut mengadvokasi kesejahteraan dan pembangunan yang lebih adil terhadap masyarakat dalam lingkup sosial, politik, dan ekonomi dengan cara mendorong proses pembuatan kebijakan yang lebih partisipatif. Fokus TURC yaitu terkait dengan isu-isu mengenai upah layak, perundingan bersama, kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan kerja, kesetaraan gender, dan jaminan sosial. TURC

⁴⁴Tentang Koalisi Perempuan Indonesia diakses dari <http://www.koalisiperempuan.or.id/tentang/> (01/03/2019. 17.20 WIB)

⁴⁵Koalisi Perempuan Indonesia diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/koalisi-perempuan-indonesia-3/> (01/03/2019. 17.20 WIB)

juga turut andil dalam menjembatani komunikasi antara serikat pekerja, antar serikat pekerja dan pemerintah dan CSO nasional atau internasional.⁴⁶

Sebagai mitra MAMPU, *Trade Union Rights Centre* (TURC) memiliki peran untuk meningkatkan kondisi kerja dengan berfokus terhadap pekerja rumahan dengan cara membentuk program organisasi seperti melakukan penelitian tentang kondisi pekerja rumahan sebagai dasar makalah posisi kebijakan, dan mengadvokasi pekerja rumahan sebagai pemasok produk bermerk nasional dan Internasional.⁴⁷

2.2.7 BITRA Indonesia

BITRA Indonesia merupakan lembaga sosial non profit yang biasa disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau secara internasional biasa disebut *Non Government Organization* (NGO) yang didirikan pada tahun 1986.⁴⁸ Sebagai mitra MAMPU, BITRA berperan dan bekerja untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berada di pedesaan melalui advokasi kebijakan, aliansi strategi, pendidikan dan pelatihan dengan melakukan beberapa program seperti melakukan pengembangan kapasitas pekerja rumahan melalui diskusi yang diselenggarakan secara rutin, pelatihan, peningkatan kesadaran, sekolah peningkatan kapasitas dan membentuk serikat pekerja dan kelompok *Credit Union* (CU), kemudian mewakili dan mendampingi anggota dalam berdiskusi dan bernegosiasi dengan pengusaha dan perusahaan guna meningkatkan upah dan kesejahteraan para pekerja rumahan,

⁴⁶Tentang KAMI "TURC" diakses dari <http://www.turc.or.id/tentang-kami/> (01/03/2019. 17.20 WIB)

⁴⁷*Trade Union Rights Centre* diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/turc-trade-union-rights-centre/> (01/03/2019. 22.18 WIB)

⁴⁸*Sejarah, Nilai dan Prinsip dasar dalam BITRA Indonesia* diakses dari <http://bitra.or.id/2012/tentang-kami/prinsip-dasar/> (01/03/2019. 22.21 WIB)

mengadvokasi akses terhadap JKN dan KIS sebanyak 1,841 orang pekerja rumahan dan keluarga.⁴⁹

2.2.8 Yayasan Annisa Swasti (YASANTI)

Yayasan Annisa Swasti berdiri sejak tahun 1982 dalam memberdayakan perempuan yang berfokus pada pekerja perempuan, pendidikan, advokasi, pengorganisasian komunitas dan memperkuat kemandirian serta ekonomi perempuan. Sebagai mitra MAMPU, fokus YASANTI terhadap peningkatan akses perempuan pada pekerjaan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja dengan didukung oleh *International Labour Organization* (ILO). Sebagai mitra MAMPU, YASANTI memiliki beberapa program organisasi seperti mengadvokasi tingkat daerah dan nasional guna mendorong perlindungan terhadap hukum, jaminan sosial, kesehatan dan ketenagakerjaan serta mengakses program pemerintah untuk pekerja perempuan dan juga keluarga.⁵⁰

2.2.9 Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI)

MWPRI merupakan organisasi jejaring yang bertujuan dan berfokus untuk memberdayakan perempuan pekerja rumahan. MWPRI berdiri sejak tahun 1996. Sebagai mitra MAMPU fokus area MWPRI yaitu untuk peningkatan akses perempuan pada pekerjaan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja . MWPRI mengembangkan kapasitas anggotanya agar mereka memahami hak mereka sebagai pekerja dan mengajarkan cara berorganisasi dengan pemberi kerja.⁵¹

⁴⁹Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA) diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/bitra-yayasan-bina-keterampilan-pedesaan-indonesia/> (02/03/2019. 10.48 WIB)

⁵⁰ YASANTI (Yayasan Annisa Swasti) diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/yasanti-yayasan-anisa-swasti/> (04/03/2019. 21.28 WIB)

⁵¹ MWPRI diakses dari <http://mampu.or.id/uncategorized/bitra-mwpri-turc-yasanti/> (04/03/2019. 21.28 WIB)

2.2.10 Migrant CARE

Sebagai mitra MAMPU, fokus Migrant Care bekerja untuk memperkuat perlindungan perempuan pekerja migran terhadap diskriminasi dan eksploitasi dengan cara meningkatkan perlindungan dan layanan pemerintah melalui program organisasi seperti memperluas jaringan dan advokasi yang berada di tingkat nasional hingga pedesaan guna melindungi para pekerja migran Indonesia, membentuk kelompok pekerja migran serta mengembangkan Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran). Desbumi memberikan pelayanan di tingkat desa untuk para pekerja migran sebelum, pada saat dan setelah migrasi yang mencakup dalam memberikan pelatihan sebelum keberangkatan, literasi keuangan, penanganan kasus serta mendukung dalam mengakses layanan program pemerintah seperti perlindungan sosial dan program ekonomi untuk purna migran.⁵²

2.2.11 Aisyiyah

Aisyiyah merupakan sebuah organisasi perempuan dibawah Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1917 yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berkontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dengan cara memperkuat partisipasi perempuan pada aspek sosial dan ekonomi. Sebagai mitra MAMPU, Aisyiyah memiliki peran untuk berfokus terhadap peningkatan kesehatan dan gizi perempuan di Indonesia melalui beberapa program organisasi sebagai mitra MAMPU yaitu bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat nasional, kemudian mengembangkan Model layanan dan model umpan balik untuk meningkatkan kesadaran dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi

⁵²Migrant Care diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/migrant-care-3/> (04/03/2019. 21.55 WIB)

(Tes IVA, Skrining kanker payudara, konseling menyusui dan asuhan paliatif), serta mengembangkan model rumah gizi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan serta layanan tentang gizi dan pemberian ASI secara eksklusif.⁵³

2.2.12 Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)

YKP merupakan lembaga sosial yang didirikan pada tahun 2001 oleh aktivis yang peduli terhadap kondisi kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia.⁵⁴ Sebagai mitra MAMPU, YKP membentuk jaringan yang terdiri dari 15 organisasi advokasi kesehatan untuk melakukan sebuah penelitian tentang akses dan layanan JKN. Fokus area YKP sebagai mitra MAMPU yaitu terhadap peningkatan kesehatan dan gizi perempuan.

2.2.13 PERMAMPU (Perempuan Sumatra Mampu)

Perempuan Sumatra Mampu berdiri pada tahun 2012 berfokus terhadap permasalahan yang dialami oleh perempuan seperti pengetahuan, kesadaran dan akses terhadap kesehatan tubuh dan reproduksi serta permasalahan berbagai bentuk kemiskinan (multidimensi) yang dialami oleh perempuan di pulau sumatra.⁵⁵ Sebagai mitra MAMPU, PERMAMPU bertugas untuk mengadvokasi tokoh strategis seperti pemimpin agama dan budaya, penyedia layanan kesehatan, sekolah dan pemerintah daerah untuk mempengaruhi norma sosial dan budaya yang dapat menghambat pemenuhan hak bagi perempuan dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan seksual, gizi dan reproduksi.⁵⁶ Program organisasi yang dijalankan oleh PERMAMPU sebagai mitra MAMPU seperti

⁵³ Aisyiyah diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/aisyiyah-3/> (04/03/2019, 21.55 WIB)

⁵⁴ Profil Yayasan Kesehatan Perempuan diakses dari <http://ykp2015.com/profil/profil/> (04/03/2019, 22.15 WIB)

⁵⁵ Orientasi Konsorsium Permampu diakses dari <http://www.permampu.org/profil/profil> (04/03/2019, 22.15 WIB)

⁵⁶ Konsorsium perempuan Sumatera MAMPU (PERMAMPU) diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/permampu-konsorsium-perempuan-sumatera-mampu/> (04/03/2019, 22.15 WIB)

membentuk sebuah kelompok perempuan di desa dengan mengembangkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan kapasitas kelompok untuk melakukan aksi kolektif agar meningkatkan akses dan kualitas terhadap kesehatan. Kemudian mengadvokasi untuk implementasi peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimum untuk kesehatan reproduksi perempuan di puskesmas.

2.2.14 Forum Pengada Layanan (FPL)

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang secara nyata menyebabkan perempuan menerima perlakuan yang tidak adil. Pada tahun 2014 forum pengada layanan bagi perempuan korban kekerasan dibentuk. Forum FPL memiliki visi untuk menghapus segala bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan meningkatkan dukungan serta tanggung jawab negara dan masyarakat dalam memenuhi hak perempuan korban dari kekerasan melalui pekerja dampingan dan pemulihan terhadap korban kekerasan di seluruh Indonesia.⁵⁷ sebagai mitra MAMPU, Forum pengada layanan berfokus terhadap area tematik MAMPU dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan seperti membentuk perempuan akar rumput untuk membangun kapasitas kolektif perempuan dalam mengadvokasi peraturan dan anggaran daerah untuk meningkatkan layanan bagi korban kekerasan serta mengembangkan kapasitas perempuan sebagai paralegal yang berbasis komunitas. Mengadvokasi pengesahan Rancangan Undang-Undang untuk penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS) dan mendukung sistem peradilan pidana

⁵⁷Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan diakses dari <https://fpl.or.id/forum-pengada-layanan-fpl/> (05/03/2019. 06.41 WIB)

terintegrasi untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah kerja forum pengada layanan.⁵⁸

2.2.15 Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan)

KOMNAS Perempuan dibentuk pada tahun 1998 sebagai lembaga nasional independen yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan seperti mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap perempuan dengan cara membangkitkan kesadaran publik, mengumpulkan data serta melaporkan permasalahan kasus kekerasan terhadap perempuan, mengkaji kebijakan serta memfasilitasi kerjasama dan jejaring guna mengurangi permasalahan kekerasan terhadap perempuan.⁵⁹ Sebagai mitra MAMPU, KOMNAS perempuan berfokus dalam area mengurangi kekerasan terhadap perempuan melalui pendekatan yang dikembangkan sebagai mitra MAMPU seperti bersama dengan forum pengada layanan (FPL) mengelola dan memperbarui data terkait kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kemudian mengadvokasi secara kolektif bersama dengan organisasi masyarakat sipil nasional serta lokal dalam isu kesetaraan gender.⁶⁰

2.2.16 Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

BaKTI merupakan penyedia platform dan alat untuk lembaga donor, pemerintah dan masyarakat agar dapat mengakses informasi, menyimpan serta bertemu dan berdiskusi mengenai isu pembangunan dan mempengaruhi pengambilan keputusan serta lebih mendukung terhadap aktivitas pembangunan

⁵⁸ Forum Pengada Layanan diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/fpl-forum-pengada-layanan/> (05/03/2019. 06.41 WIB)

⁵⁹KOMNAS PEREMPUAN diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/komnas-perempuan-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan/> (05/03/2019. 07.06 WIB)

⁶⁰*Ibid*,

yang berbasis pengetahuan.⁶¹ Sebagai mitra MAMPU, program MAMPU mendukung kerja BaKTI dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dengan cara meningkatkan kerjasama dengan parlemen di 85 desa di 7 kabupaten/kota di 5 provinsi Indonesia melalui program organisasi sebagai mitra MAMPU seperti membentuk sebuah kelompok konstituen sebagai organisasi masyarakat akar rumput yang mengadvokasi tentang hak perempuan serta menghapus kekerasan terhadap perempuan, kemudian mengembangkan model Reses Partisipatif yang mempertemukan kelompok konstituen dengan paraanggota parlemen daerah untuk memastikan isu penting masuk kedalam kebijakan, legislasi dan perencanaan anggaran pembangunan daerah.⁶²



⁶¹ Sejarah BaKTI diakses dari <https://bakti.or.id/sejarah-bakti> (05/03/2019. 07.06 WIB)

⁶² Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) diakses dari <http://mampu.or.id/mitra-kami/yayasan-bakti-bursa-pengetahuan-kawasan-timur-indonesia/> (05/03/2019. 07.31 WIB)